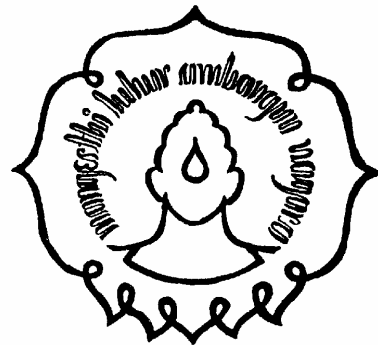


**ANALISIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1993 – 2000**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**PURI WURYANDARI
F.1100041**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2003

ABSTRAKSI

PURI WURYANDARI

F. 1100041

Penelitian ini berjudul “ Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun 1993 – 2000 “, yang berisi perhitungan untuk menentukan potensi ekonomi daerah khususnya daerah Jawa Tengah yang menggunakan data sekunder dengan runtut waktu (time series) mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2000.

Adapun data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data tenaga kerja di Jawa Tengah dan data tenaga kerja di Indonesia. Penggunaan dua jenis data PDRB dan tenaga kerja dalam perhitungan potensi ekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensi sektor di Propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi PDRB dan tenaga kerjanya. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan alat analisis Locational Quotient (LQ) dan Shift Share (SSA) yang kemudian keduanya digabungkan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sektor basis di Jawa Tengah ditinjau dari sisi PDRB adalah Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, hotel dan restoran, jasa- jasa, sementara jika ditinjau dari sisi tenaga kerja maka yang menjadi sektor basis adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa.

Berdasarkan hasil analisis data, saran-saran yang dapat digunakan adalah karena sektor pertanian semakin lama kontribusinya semakin kecil baik dari sisi PDRB maupun tenaga kerja maka diperlukan perhatian yang serius dan diperlukan pembenahan terutama dalam hal teknologi yang berkaitan dengan sektor pertanian, sementara sektor Industri Pengolahan semakin lama kontribusinya semakin meningkat terutama dalam hal penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mulai beralih dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen penguji skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Surakarta, 3 Februari 2003

Pembimbing

Bambang Supriyanto, SE

NIP. 131843291

HALAMAN PENGESAHAN TEAM PENGUJI

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh team penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, 22 Februari 2003

Team Penguji Skripsi

1. Drs. Vinc. Hadiwiyono, MA (.....)
NIP. 131569278 Ketua Penguji

2. Bambang Supriyanto, SE (.....)
NIP. 131843291 Pembimbing

3. Drs. Achmad Daerobi, MS (.....)
NIP. 131569280 Anggota

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “ Semangat adalah sebuah gunung api yang puncaknya tidak di tumbuh
rumput kebimbangan.”
- “ Maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan
menggapai ke arah apa yang belum terjadi “

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- * Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti-hentinya mengaliriku dengan
curahan kasih sayang dan doa yang tiada pernah putus
(hanya ini bisa ananda persembahkan).
- * Mba' Wik dan Di' Danank terkasih yang senantiasa memberikan kasih
dan dukungannya (kalian adalah sumber inspirasi untukku,

aku sayank kalian).

* Kel. Besar Eyang Reksomartono dan Kel. Besar Eyan Resowiredjo.

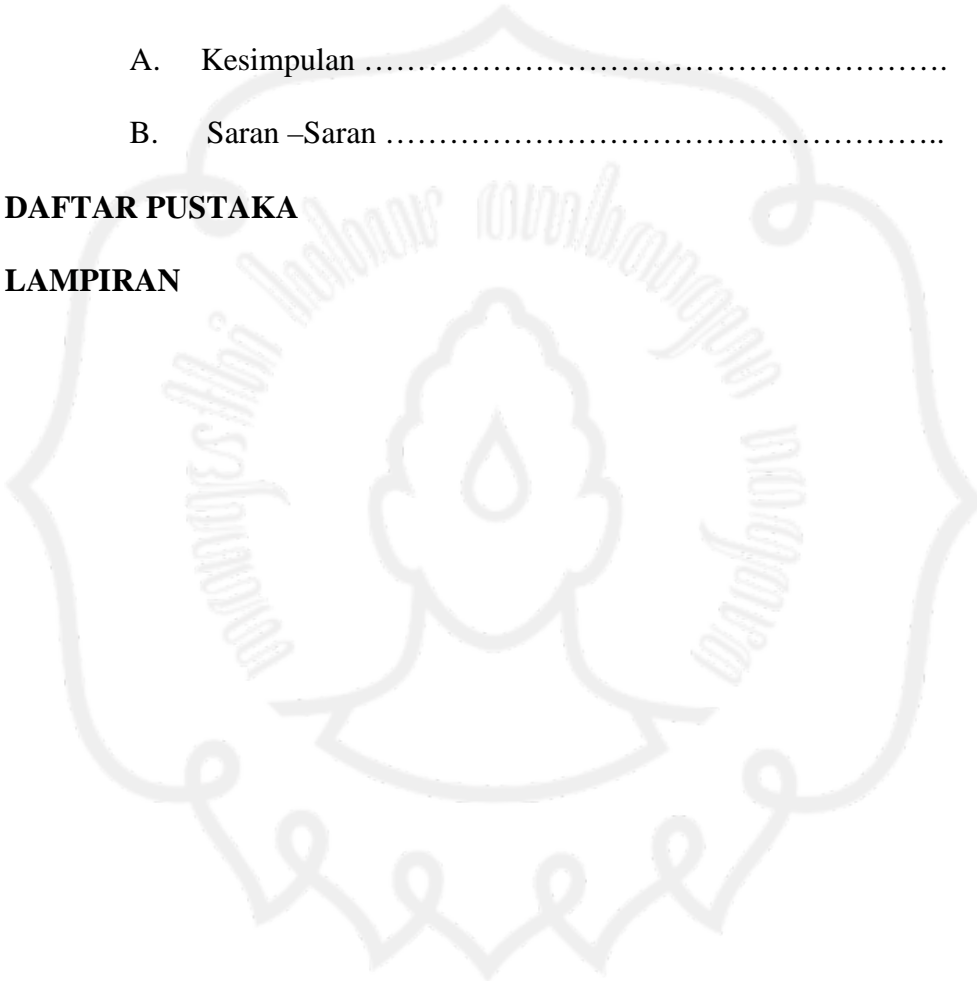
DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Abstraksi	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	8
G. Metode Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Penelitian	8

2. Variabel Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Definisi Operasional Variabel	9
5. Analisa Data	10
1. Metode Analysis Shift-Share (SSA).....	11
2. Metode Analysis Location Quotient (LQ).....	13
3. Penggabungan SSA dan LQ	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Sektor Ekonomi	16
B. Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16
C. Konsep dan Definisi Tenaga Kerja	18
D. Perencanaan Ekonomi	20
E. Fungsi dan Proses Perencanaan Ekonomi	21
F. Perencanaan Regional	23
G. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi	24
H. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi	26
1. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah	26
a. Teori Lokasi	27
b. Teori Basis Ekonomi	29
c. Teori Tempat Sentral	31
d. Teori Ekonomi Neo Klasik	32
e. Teori Kausasi Kumulatif	33

f. Model Daya Tarik	33
I. Kesenjangan Regional	33
J. Perhitungan Ekonomi basis Suatu Daerah	35
K. Analysis Shift-Share (SSA)	38
L. Hasil Penelitian Sebelumnya	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	43
A. Keadaan Wilayah	43
1. Keadaan Geografis	44
2. Iklim dan Suhu Udara	43
3. Topografi	44
4. Luas Daerah	44
B. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja	45
1. Keadaan Penduduk	45
2. Keadaan Tenaga Kerja	47
C. Keuangan dan Harga-harga	48
1. Keuangan Daerah	48
2. Investasi	49
3. Perbankan	50
4. Harga-harga	50
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51
E. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Menurut sektor	55

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Locational Quotient (LQ)	60
B. Analisis Shift – Share (SSA)	66
C. Analisis Gabungan LQ dan SSA	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	84
B. Saran –Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan Produk domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan 1993 Menurut lapangan Usaha Di Jawa Tengah Tahun 1995-2000 (Persen)	4
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan penduduk Propinsi Jawa Tengah Periode waktu tahun 1994 – 2000	46
Tabel 3.2	Jumlah Angkatan Kerja di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1994 – 2000	48
Tabel 3.3	Alokasi Dana Anggaran Pembangunan Nasional Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 – 1998/1999 (Dalam ribu rupiah)	49
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Propinsi Jawa Tengah Menu rut Jenisnya Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2000	52
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah Menu rut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 1996/1997 – tahun 2000 (dalam ribu rupiah)	54
Tabel 3.6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993 Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (dalam juta rupiah)	56

Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (dalam juta rupiah)	57
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Locational Quotient Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha / sektor tahun 1993 – 2000 Menggunakan data PDB dan PDRB	63
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Locational Quotient Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha / sektor tahun 1993 – 2000 Menggunakan data Tenaga Kerja	65
Tabel 4.3	Perhitungan Analisis Shift – Share Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha / Sektor Tahun 1993 – 2000 Menggunakan data PDB dan PDRB	79
Tabel 4.4	Perhitungan Analisis Shift – Share Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha / Sektor Tahun 1993 – 2000 Menggunakan data Tenaga Kerja	72
Tabel 4.5	Hasil Gabungan Analisis LQ dan SSA Menggunakan Data PDB dan PDRB	76
Tabel 4.6	Hasil Gabungan Analisis LQ dan SSA Menggunakan Data PDB dan PDRB	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	7
Gambar 2.1	Skema Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan gejala-gejala kearah perbaikan meskipun gejala tersebut belum sebesar yang kita harapkan, harus disadari bahwa membenahi perekonomian yang sempat berantakan bahkan nyaris hancur membutuhkan ketekunan, kesabaran dan perjuangan yang tidak ringan. Gejala kearah perbaikan ekonomi tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2000 yang telah mencapai 4,77 persen (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001 : 10).

Perbaikan ekonomi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga mengupayakan perbaikan tersebut, baik perbaikan secara makro ataupun mikro. Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, peningkatan peran serta masyarakat ditunjukkan oleh pergeseran peranan pemerintah pusat dari posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada kemandirian daerah. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang untuk masyarakat daerah. Selain itu pembangunan daerah juga ditujukan pada usaha peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang optimal dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dengan adanya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, maka kewenangan daerah untuk melaksanakan program- program pembangunan pembangunan daerahnya semakin luas. Konsekwensi dari kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan yang mengharuskan Pemerintah daerah untuk menyusun program dan rencana bagi daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut, selain itu juga membawa konsekwensi berkurangnya sumber penerimaan dominan masing-masing pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Karena itu harus benar-benar diperhatikan sektor-sektor mana yang dapat diklasifikasikan sebagai penyumbang dalam peningkatan pendapatan daerah.

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi pembangunan. Oleh karena itu diperlukan laporan makro tentang perkembangan perekonomian, salah satu data statistik yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meskipun PDRB bukan satu-satunya tolok ukur kinerja pembangunan ekonomi daerah, namun PDRB merupakan tolok ukur yang penting untuk melihat pertumbuhan kinerja sektoral. Dengan mengamati angka-angka pada PDRB maka dapat dilihat pula kontribusi sektoralnya, pertumbuhan masing-masing sektor dan potensi masing-masing sektor. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan

daerah biasanya target-target pembangunan mencakup pula target-target pencapaian yang diinginkan dalam PDRB.

Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi terbesar di pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi pada periode 1995-2000 sebesar 2,89 persen per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Listrik, Gas dan air bersih (11,70%) diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi (7,00%), kemudian sektor Pertambangan dan galian (5,60%), dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,29%), kemudian sektor Industri Pengolahan (3,12%), sementara sektor Bangunan (1,60%), sedangkan sektor-sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan terendah adalah sektor Pertanian (0,70%), di ikuti sektor Jasa-jasa (0,56%), kemudian sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,34%).

Sementara itu peranan masing-masing sektor selama periode 1995-2000 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 sektor industri pengolahan mempunyai peranan terbesar yaitu 30,35 persen, meski hal itu merupakan penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki peranan terbesar kedua dengan 23,53 persen, kemudian diikuti oleh sektor Pertanian (20,54%). Sedangkan sektor-sektor lain hanya mempunyai peranan terhadap PDRB masih dibawah 10%. (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001: 575).

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha Di Jawa Tengah tahun 1995 – 2000 (Persen)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata ²
Pertanian	5.51	3.37	-3.20	-3.35	3.07	3.21	0.70
Pertambangan dan Galian	8.94	11.85	11.35	-7.11	5.49	2.49	5.60
Industri Pengolahan	8.29	8.71	2.87	-14.61	2.82	3.19	3.12
Listrik, Gas dan Air bersih	14.19	14.03	13.47	3.64	10.38	9.86	11.70
Bangunan	7.08	11.24	6.37	-32.1	11.93	1.49	1.60
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.99	8.35	6.40	-9.00	3.20	6.70	5.29
Pengangkutan dan Komunikasi	9.56	12.88	3.61	-0.09	10.29	5.45	7.00
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.02	7.11	7.99	-34.2	3.77	2.99	0.34
Jasa – jasa	2.73	4.13	2.64	-9.6	-0.20	1.27	0.56
PDRB	7.34	7.30	3.03	-11.74	3.39	3.90	2.89

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 1999, 2000

Dalam kerangka pembangunan daerah, peningkatan peran serta masyarakat ditunjukkan oleh pergeseran peran pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dari yang semula tersentral menuju kepada pembangunan yang berdasar pada kemandirian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang untuk masyarakat di daerah. Di samping itu pembangunan daerah juga diarahkan sebagai ajang usaha peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Selanjutnya, pengusahaan pembangunan daerah secara umum ditujukan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Pembangunan daerah harus selalu memperhatikan karakteristik wilayahnya sehingga kebijaksanaan pembangunan dapat makin terarah dan sumber daya terbatas yang dimiliki suatu daerah dapat dimanfaatkan secara optimal pula. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan ekonomi dibutuhkan suatu rencana yang matang untuk menentukan sektor – sektor mana yang perlu dikembangkan dan memilih sektor – sektor prioritas, pentingnya penentuan dan pemilihan sektor – sektor tersebut di maksudkan agar dana pembangunan yang terbatas benar-benar dapat tersalur ke sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di daerah propinsi Jawa Tengah secara maksimal.

Jika ditinjau dari sisi penyerapan tenaga kerjanya sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling dominan dibanding sektor lain selama periode waktu 1993 – 2000, sementara jika dilihat dari sisi PDRB maka sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang

memberikan kontribusi terbesar selama periode waktu yang sama yaitu 1993 – 2000 (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001: 579).

Beranjak dari hal tersebut perlu diadakan pengkajian ataupun suatu analisis mengenai “ Analisis Potensi Sektoral Propinsi Jawa Tengah “ agar secara dini dapat diketahui dampak keberhasilan pembangunan dan sebagai usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pengembangan potensi dan prospek di masa yang akan datang.

B. Perumusan masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas tentang pentingnya peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor-sektor mana yang termasuk dalam kategori sektor basis dalam perekonomian propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi PDRB dan tenaga kerja.
2. Sektor-sektor mana yang merupakan sektor unggulan dalam perekonomian propinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

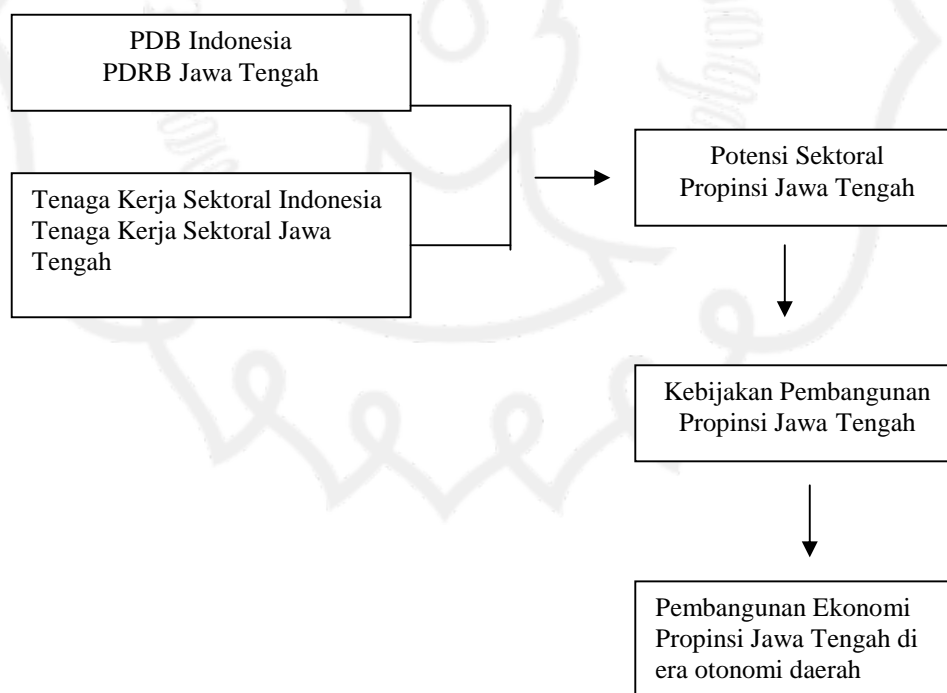
- a. Untuk mengetahui sektor-sektor yang termasuk dalam sektor basis di propinsi Jawa Tengah di tinjau dari sisi PDRB dan tenaga kerja.

- b. Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan yang berpotensi tinggi dalam perekonomian Propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi PDRB dan tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Pada masa Otonomi daerah, pembangunan ekonomi suatu daerah didasari dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat dari pemerintah daerah. Dalam menentukan kebijakan tersebut pemerintah daerah harus mengetahui sektor-sektor yang potensial dan menjadi prioritas dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang terjadi tidak salah arah dan salah sasaran. Dalam penelitian ini digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

F. Hipotesis

Sektor Pertanian diduga merupakan sektor basis ditinjau dari sisi tenaga kerja dan PDRB.

- a. Sektor Industri dan Sektor Jasa diduga merupakan sektor yang potensial dan diharapkan mampu menambah dan menopang pendapatan Propinsi Jawa Tengah di era otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilihat kondisi perekonomian secara sektoral di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1993-2000. Selanjutnya akan dianalisis juga sektor-sektor yang patut dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah di tentukan.

2. Variabel Penelitian

Adapun beberapa variabel yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993 dari tahun 1993-2000. Yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 1993 dari tahun 1993-2000.
- c. Jumlah tenaga kerja per sektor lapangan usaha Indonesia dari tahun 1993 – 2000. Yang dinyatakan dalam satuan juta orang.
- d. Jumlah tenaga kerja per sektor lapangan usaha propinsi Jawa Tengah dari tahun 1993 – 2000. Yang dinyatakan dalam satuan juta orang.

Pemilihan periode waktu 1993-2000 didasarkan pada alasan bahwa tahun 1993 merupakan tahun dasar baru dalam penetapan harga konstan yang dipakai di tingkat nasional dan telah pula diterapkan secara serentak oleh propinsi atau daerah, sedangkan penggunaan tahun 2000 dikarenakan hingga pelaksanaan penelitian ini data tahun 2000 adalah data dengan jenis sektor / lapangan usaha sama yang dikeluarkan oleh BPS.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah. Pengamatan dilakukan secara runtut waktu (time series) periode 1993-2000, sedangkan data yang digunakan merupakan data riil atau harga konstan dengan tahun dasar 1993.

4. Definisi Operasional Variabel

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (propinsi, kabupaten dan kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan out put (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.
- b. Perhitungan PDB dan PDRB sebenarnya bisa dilihat dari tiga sisi pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung nilai produksi barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu, dikurangi biaya antara dari masing-masing total produksi tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- c. Klasifikasi sektor dalam penyajian PDB/PDRB di rinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan Air bersih, bangunan/ konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan, dan Jasa-jasa.
- d. Penggunaan PDB/PDRB atas dasar harga konstan di lakukan dengan alasan supaya dapat memberikan gambaran tentang produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Selain itu, dalam perhitungan

PDB riil, faktor inflasi atau kenaikan harga secara umum telah di keluarkan dari perhitungan PDB/PDRB.

- e. Tenaga Kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disebut penduduk usia kerja yang kemudian didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas dan dibedakan sebagai Angkatan kerja dan Bukan angkatan kerja (BPS Propinsi Jawa Tengah 2000, hal 64)

5. Analisis Data

Berikut ini penulis sajikan alat-alat analisis dan perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Analysis Shift-Share

Teknik analisis ini adalah teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian. Dengan kata lain analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor di suatu wilayah perencanaan (propinsi Jawa Tengah) yang dipengaruhi oleh perekonomian wilayah yang lebih tinggi (nasional/Indonesia). Dalam teknik ini terdapat 3 komponen, antara lain komponen pertumbuhan daerah pengamatan (Indonesia), di mana variabel yang digunakan adalah kesempatan kerja dan pendapatan. Komponen kedua adalah pertumbuhan proporsional dan yang ketiga adalah pertumbuhan daya saing (Lincoln Arsyad, 1999 : 139 – 140).

Ketiga hubungan komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$V^* = (V1/V) + (Vil/Vi - V1/V) + (Yil/Yi - Vil/Vi)$$

di mana :

- V^* : Perubahan pendapatan wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah
- $V1$: Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- V : Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar
- Vil : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- Vi : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar
- Yil : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun akhir
- Yi : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun dasar

Ruas pertama dari rumus di atas menyatakan komponen pertumbuhan wilayah pengamatan (pusat), ruas kedua menyatakan komponen pertumbuhan proporsional dan ruas ketiga menyatakan komponen pertumbuhan daya saing propinsi Jawa Tengah.

Apabila komponen pertumbuhan proporsional suatu sektor > 0 maka sektor yang bersangkutan cepat pertumbuhannya dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian wilayah dan sebaliknya

apabila < 0 . Suatu wilayah yang sebagian besar pendapatannya bersumber dari sektor yang lamban pertumbuhannya, maka sektor yang bersangkutan akan tumbuh dibawah angka pertumbuhan.

Pada tingkat wilayah pengamatan khusus untuk komponen pertumbuhan daya saing wilayah, jika nilainya untuk suatu sektor > 0 , maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang luas dan sebaliknya < 0 .

2. Metode Analysis Location Quotient (L Q)

Pada dasarnya metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas (tingkat nasional). Variabel yang digunakan dalam analisis ini berupa nilai tambah serta jumlah tenaga kerja. Adapun dalam analisis ini dicoba memahami *Location Quotient (LQ)* dengan menggunakan nilai tambah bruto sebagai variabel yang ada dalam PDRB menurut harga konstan. Secara matematis *Location Quotient (LQ)* dirumuskan sebagai berikut (Iwan Jaya Azis, 1994 : 153) :

$$LQ_i^r = \frac{NTB_i^r / PDRB^r}{NTB_i^* / PDRB^*}$$

di mana :

LQ_i^r : LQ sektor i di propinsi Jawa Tengah

NTB_i^r : Nilai tambah bruto sektor i di propinsi Jawa Tengah

$PDRB^r$: PDRB propinsi Jawa Tengah

NTB_i^* : Nilai tambah bruto sektor i di Indonesia

$PDRB^*$: PDB Indonesia

Keterangan :

$LQ < 1$ berarti sektor yang bersangkutan produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri, disebabkan oleh kurangnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah karena tidak mempunyai keunggulan komparatif dan dikategorikan sektor non basis.

$LQ > 1$ atau $LQ = 1$ Berarti sektor yang bersangkutan produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut bahkan mengekspor. Oleh karena itu daerah tersebut dikatakan mempunyai keunggulan komparatif di sektor tersebut dan dikatakan sebagai sektor basis.

3. Penggabungan Location Quotient dan Shift Share

Penggabungan kedua analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan prioritas dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut : (lincolin Arsyad , 1999 : 150)

Prioritas pertama : apabila sektor tersebut merupakan sector basis, mempunyai keunggulan komperatif dan laju pertumbuhannya cepat.

Prioritas kedua : apabila sektor tersebut merupakan

a. Sektor basis dan mempunyai keunggulan komperatif.

- b. Sektor basis dan pertumbuhannya cepat.
- c. Sektor non basis yang mempunyai keunggulan komperatif dan pertumbuhannya cepat.

Prioritas ketiga : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis namun hanya mempunyai keunggulan komperatif saja.

Prioritas keempat : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis namun pertumbuhannya cepat.

Prioritas kelima : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis tidak mempunyai keunggulan komperatif dan pertumbuhannya lambat.

Prioritas alternatif : sektor tersebut merupakan sektor basis namun pertumbuhannya lambat dan tidak mempunyai keunggulan komparatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sektor Ekonomi

“Yang dimaksud dengan sektor ekonomi adalah bidang kegiatan ekonomi dimana penduduk suatu negara melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa faktor produksi sebagai input untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis output sehingga faktor produksi tersebut mendapatkan balas jasa.”
(BPS Jawa Tengah, 2000:12)

B. Konsep dan definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi pada suatu regional / daerah yang sangat diperlukan untuk menyongsong era globalisasi, di samping itu PDRB juga diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi regional.

Untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditimbulkan dari suatu region, ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu (BPS Jawa Tengah, 2000: 12):

1. Menurut Pendekatan Produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (menurut KLUI) yaitu: Pertanian, yang meliputi (tanaman bahan makanan, tanaman

perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan), Pertambangan dan Galian, Industri Pengolahan, Listrik gas dan air bersih, Bangunan, Perdagangan hotel dan restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan persewaan dan jasa perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha)
3. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti :
 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
 2. Konsumsi pemerintah.
 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
 4. Perubahan stock.
 5. Ekspor netto.

Dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor.

C. Konsep dan Definisi Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor dinamika yang paling penting. Faktor penduduk mempengaruhi, bahkan menentukan arah perkembangan masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Dalam hal ini, penambahan penduduk berpengaruh pada tiga masalah pokok. Pertama, pengadaan kebutuhan-kebutuhan pokok secara total harus diperbesar, khususnya pengadaan pangan, kedua, penduduk yang bertambah juga menambah angkatan kerja (AK). Ini berarti keharusan untuk memperluas lapangan kerja guna menanggulangi masalah pengangguran. Ketiga, penambahan penduduk cenderung mempertajam kepincangan dalam pembagian pendapatan antar golongan masyarakat, antar daerah, dan antar pedesaan serta perkotaan.

“Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan kesempatan kerja yang tersedia merupakan sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan memberikan sumbangan yang cukup besar pada pembangunan ekonomi, melalui proses produksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pendapatan yang meningkat” (Yudo Swasono – Endang Sulistyaningsih, 1983 : 3).

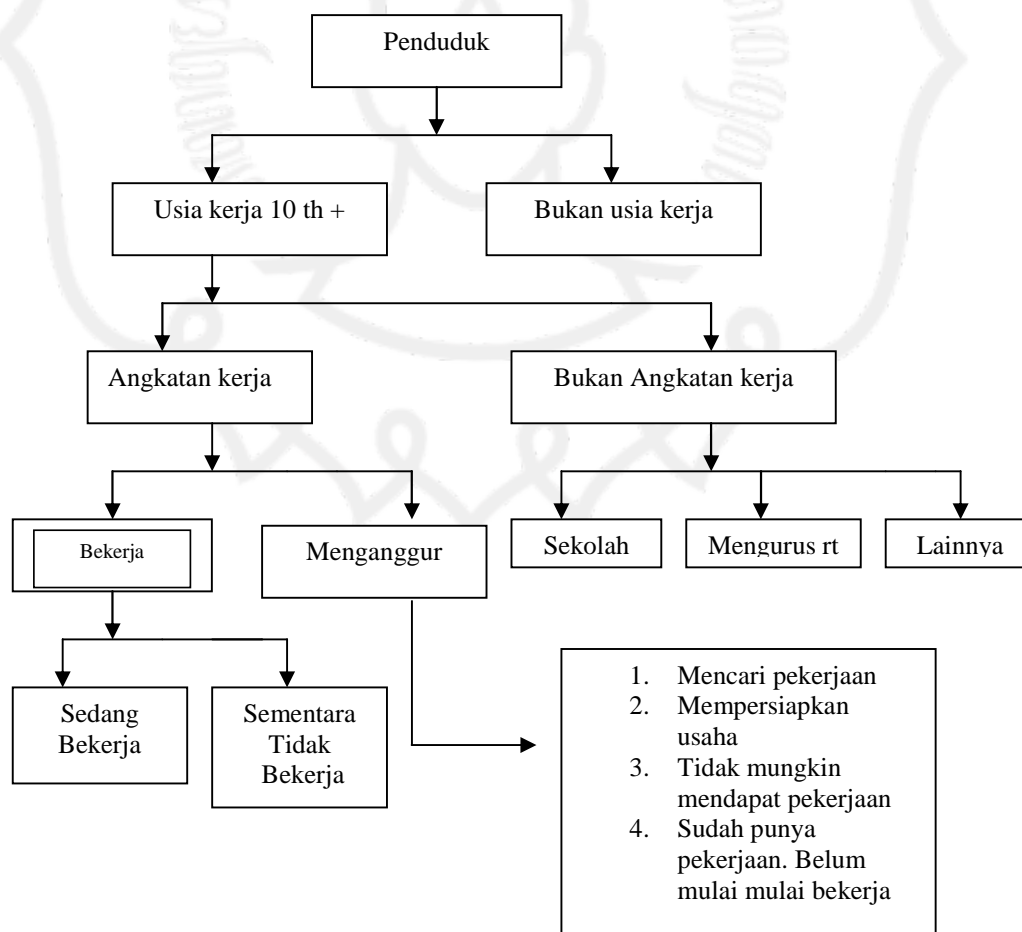
Pengertian Tenaga Kerja (TK) menurut UU no 14 tahun 1969 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga Kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir (pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga)

walaupun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

“Secara praktis pengertian Tenaga Kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih”. (Payaman J. Simanjuntak, 1985: 2)

Sementara komposisi penduduk dan tenaga kerja menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2002 adalah sebagai berikut :

Gambar. II. 1 Skema Komposisi Penduduk dan Tenaga kerja



D. Perencanaan Ekonomi

Perencanaan adalah suatu teknik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu Badan Perencanaan di tingkat pusat. Tujuan – tujuan tersebut bisa berupa tujuan sosial, politik, atau militer. Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* (1996), membagi perencanaan dalam 6 pengertian, yaitu (Lincoln Arsyad, 1993: 18) :

1. Berhubungan dengan letak geografis, yang sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara.
2. Perencanaan berarti memutuskan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang.
3. Suatu perencanaan ekonomi di mana setiap unit produksi hanya memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), bahan baku, dan perlengkapan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produksinya kepada perusahaan yang ditunjuk pemerintah.
4. Penentuan sasaran produksi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan perencanaan seperti ini hanya untuk suatu cabang industri tertentu atau produk / jasa yang dianggap strategis.
5. Penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumber daya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.

6. Perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran–sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

E. Fungsi dan Proses Perencanaan Ekonomi.

Perencanaan ekonomi merupakan suatu alat untuk mencapai sasaran dan tujuan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar mencapai sasaran yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan tersebut, maka dapat kita lihat alasan perlunya perencanaan dari sudut pandang ekonomi (Todaro, 1998: 56) :

1. Penggunaan alokasi sumber – sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan–pemborosan.
2. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan.
3. Stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

Perencanaan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel – variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan – gagasan tentang pengaruh, pengarahan dan pengendalian (Suroso, 1997: 12).

Suatu perencanaan ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarnya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya (Suroso, 1997: 95).

Proses pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai berikut (Lincoln Arsyad, 1997: 24) :

Tahap pertama adalah proses perencanaan (ekonomi). Ditetapkan dan diterjemahkan kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya.

Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lainnya. Kesemuanya itu bersama keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (*constraints*) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target – targetnya.

Tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek – proyek

investasi, seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik – pabrik, pusat – pusat kesehatan. Yang termasuk perencanaan nasional : kebijaksanaan – kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat suku bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini merangsang perusahaan– perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan–tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan – hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan–kegiatan pembangunan lainnya.

Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan–kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu oleh adanya kendala–kendala sumber daya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (*development strategy*) atau rencana yang mengatur kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).

F. Perencanaan Regional

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta. Petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi – organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Suatu

daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk kepentingan daerah – daerah, melainkan juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Antara lain yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan apa yang dikatakan *back wash effect*, yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang dibangun, sehingga daerah lain sekitar daerah itu menjadi mundur dan terbelakang. Disamping adanya pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah – daerah disekitar dimana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan *spread effects* (Lincoln Arsyad, 1997: 129).

G. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan batasan tersebut maka pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dapat meningkat dalam jangka panjang. Maka dari definisi tersebut, pembangunan

ekonomi mempunyai 3 sifat penting, yaitu bahwa pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.
2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per – kapita.
3. Kenaikan pendapatan per – kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi sehingga dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Lincoln Arsyad, 1997:11).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan hanya meliputi kenaikan output produksi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Jadi pembangunan selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Dengan demikian suatu perekonomian dapat dikatakan sedang berkembang apabila pendapatan per-kapita menunjukkan kecenderungan (trend) jangka panjang yang meningkat. Namun demikian tidak berarti bahwa pendapatan per – kapita akan

mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor misalnya, dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi secara rata – rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Pengertian pembangunan ekonomi secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk melihat laju pembangunan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu syarat utama.

H. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

1. Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam pertumbuhan regional tidaklah semua sama dengan apa yang dikemukakan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan karakteristik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi regional dan pertumbuhan ekonomi nasional juga mempunyai ciri yang sama, yaitu memberi tekanan pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi.

Pada pembangunan ekonomi regional memberikan tekanan pada unsur region, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian juga berbeda

dengan apa yang ada pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan teknologi. Akan tetapi pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Karena perbedaan faktor-faktor tersebut maka analisa pertumbuhan ekonomi regional berbeda dengan teori-teori dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi nasional.

Teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi regional diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori lokasi

Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. Kelompok pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip-prinsip Least Cost Theory, yang menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur pasar dan permintaan. Analisa dari aliran Least Cost Theory didasarkan pada asumsi pokok antara lain : a) lokasi pasar dan sumber bahan baku telah tertentu, b) sebagai bahan baku adalah Localized materials, c) tidak terjadi perubahan teknologi, d) ongkos transport tetap untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. Kelompok kedua dinamakan Market Area Theory dimana faktor permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan lokasi. Teori ini disusun atas dasar beberapa asumsi utama yaitu: a) konsumen tersebar secara merata ke seluruh tempat, b) bentuk persamaan permintaan

dianggap sama, c) ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama. Kelompok yang ketiga dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menyewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku di daerah perkotaan yang harga sewa dan tanah sangat tinggi. Teori ini juga disusun atas dasar beberapa asumsi tertentu yaitu : a) terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan dan tingkat kesuburan yang sama, b) ditengah tanah tersebut terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi, c) ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi, d) harga barang produksi juga sama untuk setiap jenis produksi, e) tidak terjadi perubahan teknologi (Hendra Esmara, 1985 : 327).

Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan lokasi yang dapat meminimumkan biaya. Lokasi optimum dari suatu perusahaan industri pada umumnya terletak di mana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau pada sumberbahan baku. Alasan ini adalah bila suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku atau hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang timbul dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat dirasakan manfaatnya (Lincoln Arysad,1999:117).

Selain yang diterangkan di atas tentu saja banyak variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi, misalnya :

upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan bahan baku, komunikasi, transportasi, kualitas pemerintah daerah dan masih banyak lagi.

b. Teori Basis Ekonomi

Teori ini didasari dari sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap daerah tergantung pada letak geografis daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan suatu daerah, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.

Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor basis dan bukan basis. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa keluar perekonomian atau memasarkan barang dan jasa kepada mereka yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan.

Dengan demikian sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak multiplier terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Disisi lain sektor non basis adalah kegiatan sektor yang menyediakan barang atau jasa

yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh sektor ekonomi basis yang berada dalam batas perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut model basis ekonomi ditentukan oleh kemampuan suatu daerah tersebut melakukan ekspor berupa barang atau jasa termasuk tenaga kerja.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor basis. Kemajuan antara lain disebabkan oleh perkembangan jaringan transportasi, perkembangan permintaan dan pendapatan dari wilayah lain, perkembangan teknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kemunduran sektor basis disebabkan oleh perubahan permintaan dari luar wilayah, habisnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dari perkembangan teknologi (Yasri, 1994: 9).

Strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Faktor-faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan

baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Lincoln Arsyad, 1999 : 116).

c. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menganggap bahwa ada semacam hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik didaerah perkotaan maupun didaerah pedesaan (Lincoln Arsyad, 1999 : 117).

Dampak dari adanya tempat sentral ini adalah aglomerasi industri. Keuntungan dari adanya aglomerasi industri ini adalah : pertama yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya beroperasi dengan skala besar, karena adanya jaminan sumber bahan baku dan pasar. Kedua, yaitu adanya saling keterkaitan antar industri sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat di penuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum. Ketiga, yaitu timbulnya fasilitas sosial dan ekonomi dapat digunakan secara bersama-sama sehingga pembebanan ongkos untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin (Hendra Esmara,1985:336).

Untuk mempelajari apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non basis dalam suatu wilayah dapat digunakan metode

pengukuran langsung metode pengukuran tidak langsung (Glasson, 1974 dalam Yasri, 1994 : 9). Metode pengukuran langsung dilakukan melalui survey secara langsung dalam mengidentifikasi sektor mana yang basis dan mana yang non basis. Melalui pendekatan ini dapat ditentukan sektor basis maupun non basis secara tepat, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan dana dan sumber daya yang besar. Atas dasar ini para pakar ekonomi regional merekomendasikan penggunaan metode pengukuran tidak langsung yaitu menggunakan kuosien lokasi (Locational Quotient).

d. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah, karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan. Teori ini memberi dua konsep dalam pembanguana ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang berupak rendah (Lincoln Arysad, 1999 ; 116).

e. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-

daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain (Lincoln Arsyad,1999:117).

f. Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan intensif (Lincoln Arsyad, 1999 : 188).

I. Kesenjangan Regional

Isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Williamson (1965) mengajukan hipotesis bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan antar daerah adalah merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan dalam sumberdaya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah.

Friedmann (1965) dalam Ni Luh W (1999) dalam core peripheri mengemukakan bahwa pada tahap awal pembangunan cenderung mengkonsentrasi pada daerah-daerah urban dan kemudian menyebar kedaerah-daerah terbelakang biasanya memiliki keunggulan yang terbatas yang tidak cukup untuk memperbaiki ketinggalannya dari daerah maju yang mempunyai aglomerasi.

Myrdal (1957) mengemukakan pendapatnya bahwa dalam pembangunan jangka panjang pendapatan per-kapita antar daerah cenderung timpang (divergen) daripada konvergen, karena tercapainya skala ekonomis

pada pusat-pusat aglomerasi akibat naik turunnya return to scale secara kontinyu. Perbedaan perkembangan antar daerah menurutnya disebabkan oleh dua faktor yaitu “ *backwash effect* “ dan “ *spread effect* “. “ *Backwash effect* “ adalah faktor-faktor yang menyebabkan mengalirnya dan mengumpulnya faktor-faktor produksi dari daerah yang kurang maju ke daerah-daerah yang lebih maju. Sedangkan “ *spread effect* “ merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terpercarnya hasil-hasil pembangunan dari daerah yang maju ke daerah kurang maju. Perbedaan perkembangan antar daerah akan meningkat selama *backwash effect* mendominasi *spread effect*.

Ketimpangan daerah regional merupakan konsekuensi logis dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dari pembangunan itu sendiri. Perbedaan perkembangan antar daerah terutama disebabkan oleh adanya perbedaan sumberdaya dan kecenderungan untuk investasi di daerah urban karena tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, perbankan, asuransi dan jasa lain serta tenaga kerja yang murah (Lincoln Arsyad, 1999: 129).

J. Perhitungan Ekonomi basis Suatu Daerah

Adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah atau wilayah disebabkan oleh adanya kegiatan produksi masyarakat di wilayah tersebut yang dapat diekspor atau dijual ke daerah lain. Inti dari konsep ekonomi basis adalah bagaimana sektor basis mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sektor non basis.

Salah satu cara yang digunakan adalah analisis Locational Quotient (LQ). Penyusunan metode LQ ini didasari oleh teori ekonomi basis. Pada teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Dalam industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Arus pendapatan itu menyebabkan kenaikan konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya menaikkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesempatan kerja baru (Lincoln Arsyad, 1999 : 141).

Analisis LQ merupakan suatu analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari criteria kontribusi. Sedangkan Iwan Jaya Azis (1994 : 233) yang mendefinisikan LQ sebagai suatu alat analisis yang menunjukkan besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah yang lain.

Pengertian yang lain tentang analisis LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 1985 dalam Yusuf, 1999: 227). Variabel yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah tenaga kerja, nilai tambah, jumlah penduduk, luas lahan, produksi, dan pendapatan regional (Isaard, 1971: 123).

Berikut ini adalah rumus perhitungan analisis LQ (Iwan Jaya Azis, 1994: 153) :

$$LQ_i^r = \frac{NTB_i^r / PDRB^r}{NTB_i^* / PDRB^*}$$

di mana :

LQ_i^r : LQ sektor i di propinsi Jawa Tengah

NTB_i^r : Nilai tambah bruto sektor i di propinsi Jawa Tengah

$PDRB^r$: PDRB propinsi Jawa Tengah

NTB_i^* : Nilai tambah bruto sektor i di Indonesia

$PDRB^*$: PDB Indonesia

Adapun nilai – nilai hasil perhitungan analisis ini adalah bilamana nilai $LQ > 1$, hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis yang artinya sektor tersebut prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Atau dapat pula diartikan bahwa sektor tersebut merupakan suatu surplus di daerah tertentu dan, oleh karena itu, beberapa produk dari sektor tersebut dapat diekspor ke daerah lain.

Sedangkan bilamana $LQ < 1$, maka hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor non basis yang artinya sektor tersebut memberikan indikasi yang tidak menguntungkan apabila dikembangkan lebih lanjut atau dapat pula dikatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor defisit sehingga daerah yang bersangkutan memerlukan impor hasil dari sektor lain untuk memenuhi permintaan terhadap produk dari sektor tersebut (Iwan Jaya Aziz, 1994: 153).

Dari analisis LQ ini dapat pula disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai LQ suatu sektor maka semakin tinggi pula keunggulan komparatif yang dimiliki daerah itu untuk mengembangkannya dibandingkan dengan daerah lain.

Berikut ini beberapa asumsi yang melandasi penggunaan analisis LQ :

- 1) Penduduk di wilayah yang bersangkutan pola dan selera konsumsinya sama dengan pola dan selera konsumsi wilayah yang lebih luas.
- 2) Permintaan wilayah terhadap barang dan jasa terlebih dulu dipenuhi oleh produksi wilayah yang bersangkutan dan kekurangannya akan diimpor dari wilayah lain.
- 3) Spesialisasi lokal dalam memproduksi, sehingga eksportnya sesuai dengan spesialisasinya.
- 4) Penggunaan teknologi yang sama dalam pengolahan suatu sektor baik di daerah yang bersangkutan dengan daerah acuan yang lebih luas.

(Richardson, 1977 dalam Yasri, 1994 : 10; Iwan Jaya Aziz, 1994: 233).

Adapun beberapa keunggulan analisis ini antara lain : 1) Konsepnya sederhana sehingga mudah dilakukan, 2) Hanya membutuhkan biaya yang relatif kecil, 3) Dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu wilayah, 4) Dapat memberikan peranan dalam pertumbuhan wilayah (Richardson, 1977 dalam Yasri, 1994 : 10).

K. Analisis *Shift Share* (SSA)

Dengan metode ini dapat dianalisis mengenai perubahan struktur suatu perekonomian lokal dalam hubungannya dengan sistem perekonomian yang

lebih tinggi (acuan). Dengan membandingkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah relatif terhadap kinerja sistem perekonomian yang lebih tinggi akan diperoleh hubungan pengaruh wilayah perencanaan kabupaten dengan wilayah propinsi atau wilayah propinsi dengan wilayah suatu negara (nasional). Dengan demikian pergeseran hasil pembangunan pada suatu wilayah propinsi maupun pada wilayah itu sendiri dapat diketahui. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, pendapatan, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja.

Metode analisis ini bertitik awal pada munculnya asumsi atau anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu (Lincoln Arsyad 1999: 139 – 140) :

1) Pertumbuhan Nasional (*National Growth Component*)

Pada komponen pertama ini, perubahan output atau pendapatan (ataupun indikator lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu wilayah dan sektor secara seragam.

2) Pertumbuhan Sektoral (*Industrial Mix Component*)

Komponen kedua ini merupakan pergeseran proporsional yang muncul karena adanya perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan

baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.

3) Pertumbuhan Daya Saing (*Competitive Effect Component*)

Komponen ketiga terjadi karena adanya peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat/lamban dari wilayah lain. Hal ini ditentukan oleh adanya keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, dukungan kelembagaan, infra struktur sosial dan ekonomi, dan kebijakan ekonomi nasional.

Secara matematis hubungan dari ketiga komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$V^* = (V1/V) + (Vil/Vi - V1/V) + (Yil/Yi - Vil/Vi)$$

di mana :

- V^* : Perubahan pendapatan wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah
- $V1$: Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- V : Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar
- Vil : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- Vi : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar

Y_{i1} : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun akhir

Y_i : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun dasar

Ruas pertama dari rumus di atas menyatakan komponen pertumbuhan wilayah pengamatan (propinsi), ruas kedua menyatakan komponen pergeseran proporsional dan ruas ketiga menyatakan komponen pertumbuhan daya saing propinsi Jawa Tengah.

Apabila komponen pertumbuhan proporsional suatu sektor > 0 maka sektor yang bersangkutan cepat pertumbuhannya dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian wilayah, dan sebaliknya apabila < 0 . Suatu wilayah yang sebagian besar pendapatannya bersumber dari sektor yang lamban pertumbuhannya, maka sektor yang bersangkutan akan tumbuh di bawah angka pertumbuhannya.

Pada tingkat wilayah pengamatan khusus untuk komponen pertumbuhan daya saing wilayah, jika nilainya untuk suatu sektor > 0 , maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas dan sebaliknya jika < 0 .

L. Hasil Penelitian sebelumnya

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu Tri Hartanto (2001) yang menganalisis sektor-sektor prioritas yang mendukung perekonomian daerah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah

tahun 1993 – 1999 dengan menggunakan metode basis ekonomi serta shift share analisis.

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yaitu : komposisi struktur perekonomian yang paling dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kota Semarang dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1993 – 1999 kontribusi sektor ini sebesar 33,32 persen.

Sementara itu, secara sektoral terdapat enam sektor yang tergolong dalam sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor bangunan; dan sektor jasa. Hal ini berarti keenam sektor basis ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri tetapi juga mampu mengekspornya keluar daerah.

Selanjutnya dari penggabungan analisis Location Quotient dan Shift Share, terdapat beberapa prioritas sebagai alternatif pengembangan perekonomian daerah dengan memperhatikan sumber dana dan sumber daya daerah tersebut. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mendapat prioritas pertama untuk segera dikembangkan.

Adapun prioritas kedua terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor

jasa. Sedangkan sektor-sektor dengan prioritas ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut adalah sektor bangunan; sektor pertambangan dan penggalian; dan yang terakhir sektor pertanian.



BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. KEADAAN WILAYAH

1. Keadaan geografis

Posisi geografis propinsi Jawa tengah terletak antara 540° lintang selatan dan 830° lintang selatan, $108,30^{\circ}$ bujur timur dan $111,30^{\circ}$ bujur timur (termasuk pulau Karimunjawa). Jarak dari barat ke timur adalah 263 Km, sedang jarak dari utara ke selatan adalah 2666 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

Secara administratif batas-batas wilayah Propinsi Jawa Tengah adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 35 daerah kabupaten dan kota, yaitu 6 daerah kata dan 29 daerah kabupaten, dengan 353 kecamatan, yang meliputi 8.530 desa dan 606 kalurahan.

2. Iklim dan Suhu udara

Secara umum iklim di Jawa Tengah termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Musim hujan terjadi pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-

Oktober, menurut stasiun klimatologi kelas I Semarang, suhu rata-rata di Jawa Tengah tahun 1998 berkisar antara $18^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$. tempat-tempat yang berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara yang relatif tinggi. Sementara itu suhu rata-rata tanah berlumpur (kedalaman 5 Cm), berkisar antara $17^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$, rata-rata suhu air antara $21^{\circ}\text{C} - 41^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 72 % sampai dengan 94 %.

Jumlah curah hujan dalam satu tahun 2000 mm, sehingga Jawa Tengah termasuk beriklim basah. Jumlah curah hujan rata-rata bulanan di bagian dataran rendah utara minimum 3 mm dan maksimum 663 mm, sedangkan di bagian dataran rendah selatan minimum 8 mm dan maksimum 207 mm.

3. Topografi

Secara topografi areal tanah yang ada di propinsi Jawa Tengah di golongan menjadi 4 daerah ketinggian diatas permukaan air laut, yaitu:

- Ketinggian 0 – 100 M, meliputi wilayah seluas 53, 3 %
- Ketinggian 100 – 500 M, meliputi wilayah seluas 27, 4 %
- Ketinggian 500 – 1000 M, meliputi wilayah seluas 14, 7 %
- Ketinggian > 1000 M, meliputi wilayah seluas 4, 6 %

4. Luas Daerah

Luas wilayah propinsi Jawa Tengah adalah 32.547 Km^2 , dan yang terluas adalah kabupaten Cilacap yaitu $2.138, 51\text{ Km}^2$, dan yang terkecil adalah Kota Magelang, yaitu $18, 12\text{ Km}^2$.

B. KEADAAN PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi (Susenas) pada tahun 2000, penduduk Propinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 30, 78 juta jiwa atau sekitar 15 % penduduk Indonesia. Dengan jumlah tersebut Propinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga di seluruh propinsi Pulau Jawa. Hasil Susenas tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan) sebesar 98. Adapun jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2001 di proyeksikan sebesar 31, 73 juta jiwa.

Masalah perhitungan laju pertumbuhan penduduk didasarkan angka rata-rata selama periode tertentu, dikarenakan sensus penduduk diadakan secara resmi 10 tahun sekali. Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan hasil Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1998 berjumlah 30, 38 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2000 berjumlah 30, 78 juta jiwa, ini berarti selama 2 tahun mengalami kenaikan sebesar 390.401 orang.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin dan tingkat kepadatan Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1994 – 2000 (orang)

Tahun	Laki ²	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk / Km ²	Rasio Jenis Kelamin
2000	15.253.438	15.522.408	30.775.846	945,67	98,27
1999	15.245.718	15.515.503	30.761.221	945,22	98,26
1998	15.036.344	15.349.101	30.385.445	933,67	97,96
1997	14.770.846	15.136.630	29.907.476	918,98	97,58
1996	14.546.511	15.152.234	29.698.845	912,57	96,00
1995	14.556.250	14.963.197	29.519.447	907	97,28
1994	14.432.764	14.880.657	29.313.421	901	96,99

Sumber : BPS Jawa Tengah 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Sementara itu kepadatan penduduk selama periode 1994-2000 juga cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2000 kepadatan penduduk di propinsi Jawa Tengah sebesar 946 per kolometer persegi. Namun begitu, penyebaran penduduk propinsi Jawa Tengah belum merata.

Secara umum tingkat kepadatan penduduk wilayah kota lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Pada tahun 2000 wilayah terpadat di propinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu jiwa setiap kilo meter persegi. Sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah kabupaten Blora, yaitu 450 jiwa setiap kilometer persegi.

2. Keadaan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja yang terampil, berkualitas, dan mampu bersaing merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat penting artinya bagi pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah dalam era globalisasi. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur lebih dari 10 tahun keatas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja.

Berdasarkan hasil Susenas, tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah tahun 2000 mencapai 14, 49 juta orang atau turun sebesar 0, 51 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka kesempatan kerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2000 cukup tinggi yaitu sekitar 95, 78 %. Dari angka tersebut dapat diyakini bahwa tingkat pengangguran terbuka di Propinsi Jawa Tengah relatif kecil, yaitu 4, 22 %.

Dari angkatan kerja yang ada sebagian besar dari mereka ternyata belum / tidak tamat SD (75%) dan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan semakin berkurang persentasenya. Menurut status pekerjaan utamanya, pada tahun 2000 pekerja yang berstatus buruh/ karyawan tercatat sebesar 36, 30 % dan tampak paling dominan di bandingkan status pekerjaan utama yang lain. Untuk tenaga kerja yang berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga / buruh tetap / tidak tetap sebesar 22, 43 %. Kemudian tenaga kerja yang bekerja sendiri tanpa

dibantu orang lain sebesar 21, 70 % dan pekerja keluarga 19, 57 % (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001: 22).

Tabel 3.2
Jumlah Angkatan Kerja di Propinsi Jawa Tengah
Periode Tahun 1994 – 2000

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
2000	15.129.122	10.172.714	25.301.836
1999	15.433.345	9.689.036	25.122.381
1998	14.949.263	9.624.980	24.574.243
1997	14.405.167	9.850.757	24.255.924
1996	14.394.169	9.379.077	23.773.246
1995	14.062.056	9.588.160	23.650.216
1994	13.850.929	9.735.231	23.586.160

Sumber : BPS Jawa Tengah, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

C. Keuangan dan Harga-harga

1. Keuangan Daerah

Dana Pembangunan Nasional dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Propinsi Jawa Tengah untuk pembangunan 20 sektor/kegiatan tahun anggaran 2000 tercatat sebesar Rp. 1,16 Trilyun. Dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya mengalami penurunan hampir separuhnya. Sektor Pertambangan dan Energi mendapatkan anggaran yang paling tinggi yaitu sebesar 29, 22 % dari total alokasi APBN. Sementara itu, dana yang digali dari daerah pada tahun anggaran 2000 terhimpun sekitar Rp. 322 Milyar, naik 33, 92 % dari tahun anggaran sebelumnya. Selama periode 1994 / 1995 – 1998 / 1999 realisasi penerimaan daerah tingkat II dibanding

pengeluarannya menunjukkan posisi positif, setiap tahun terjadi penambahan penerimaan rata – rata sekitar 33 %. Disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir rata-rata meningkat sekitar 16 % setiap tahunnya (BPS Jawa Tengah, 1999, 2000).

Tabel 3. 3
Tabel Alokasi Dana Anggaran Pembangunan Nasional
Di Propinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 1996/1997 – 1998/1999
(Dalam ribu rupiah)

Tahun Anggaran	Total Alokasi
1996/1997	1.187.375.085
1997/1998	1.320.122.074
1998/1999	1.757.025.467
1999/2000	2.352.404.751
2000	1.158.511.711

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001

2. Investasi

Perkembangan perekonomian daerah tidak dapat lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah. Adapun nilai dan realisasi investasi selama periode 1996 – 2000 berfluktuatif. Penanaman modal Daerah Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) pada tahun 2000 telah disetujui sebanyak 34 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 2, 45 Trilyun dengan perkiraan tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 18.000 orang.

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) SPT yang dikeluarkan sebanyak 56 proyek dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.000 orang dengan nilai investasi sebesar 72, 07 Juta dollar Amerika (BPS Propinsi Jawa Tengah 2001: 21).

3. Perbankan

Peranan Perbankan sebagai institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan perekonomian daerah sangatlah penting. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, maupun deposito dari tahun ke tahun terus meningkat.

Untuk simpanan berjangka rupiah dan valuta asing pada tahun 2000 mencapai Rp. 35, 96 Trilyun. Hal ini berarti terjadi peningkatan hampir sebesar tiga kali lipat. Sementara simpanan dalam bentuk tabungan di Jawa Tengah terhimpun sebesar Rp. 12, 70 Trilyun yang merupakan peningkatan sebesar 19, 85 % dari tahun sebelumnya. Disisi lain, Giro pada bank umum mengalami kenaikan (24, 43 %) dari Rp. 4, 09 Trilyun pada tahun 1999 menjadi Rp. 5, 09 Trilyun pada tahun berikutnya (BPS Propinsi Jawa Tengah 2001: 23).

4. Harga – Harga

Kondisi perekonomian yang berangsur-angsur membaik memberikan dampak yang positif pada tingkat inflasi. Pada tahun 2000 angka inflasi Kota Semarang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni mencapai 8, 73 %, sedangkan pada tahun sebelumnya angka inflasinya yaitu sebesar 1, 51 %. Namun begitu, tingkat inflasi Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah masih dibawah tingkat inflasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat harga di Semarang perubahannya dapat ditekan.

Besarnya angka inflasi dipengaruhi oleh perubahan harga menurut kelompok barang. Secara umum naiknya indeks harga masing-masing kelompok barang pada tahun 2000 jauh lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar angka inflasi tahun 2000 adalah kenaikan indeks harga kelompok pendidikan (13,37 %) dan kelompok transportasi dan Komunikasi (13,71 %). Sedangkan rendahnya perubahan indeks harga kelompok bahan makanan (2,53 %) menjadikan angka inflasi dapat sedikit ditekan (BPS Propinsi Jawa Tengah 2001: 26).

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator pertumbuhan ekonomi daerah lainnya adalah dengan melihat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. APBD mencerminkan secara nyata kondisi perekonomian suatu daerah dari sisi asal pendapatannya dan apa saja pengeluaran suatu daerah pada tahun tertentu. Sedangkan PAD menggambarkan pendapatan yang benar-benar berasal dari daerah tersebut.

APBD terdiri dari dua komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Komponen penerimaan tersusun atas penerimaan dari pusat, PAD, bagi hasil dan bantuan lain namun pada tabel 3.4 diringkas menjadi penerimaan saja. Sedangkan komponen pengeluaran terbagi atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sementara itu sebagai penunjang sisi penerimaan pada APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tersusun atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba milik daerah, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain.

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Propinsi Jawa Tengah

Menurut Jenisnya Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2000

(Juta Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran		Realisasi	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
1996/1997	1.556.141	1.556.141	1.500.398	1.460.140
Rutin		1.298.371		1.210.312
Pembangunan		257.770		249.828
1997/1998	1.483.189	1.483.189	1.452.105	1.420.371
Rutin		1.227.683		1.177.748
Pembangunan		255.508		242.623
1998/1999	591.875	591.875	636.869	587.720
Rutin		409.141		411.172
Pembangunan		182.734		176.548
1999/2000	941.719	941.719	886.266	796.446
Rutin		638.725		536.884
Pembangunan		302.994		259.562
2000	923.327	923.327	1.081.631	857.279
Rutin		589.990		542.949
Pembangunan		333.337		314.330

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2001

Dampak krisis ekonomi juga terlihat dalam APBD Jawa tengah khususnya pada tahun anggaran 1998/1999. Pada tahun anggaran tersebut APBD Jawa

Tengah turun lebih dari 50 persen dari 1,4 trilyun rupiah pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 0,6 trilyun rupiah pada tahun berikutnya.

Pada tabel 3.4 diatas, sisi penerimaan propinsi Jawa Tengah dalam APBD sering kali tidak mampu memenuhi target yang direncanakan kecuali pada tahun anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran 2000. Sementara itu dari sisi pengeluaran tampak terjadi ketimpangan dari proporsi pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Sebagian besar pengeluaran Propinsi Jawa Tengah digunakan untuk konsumsi yang bersifat rutinitas (rata-rata hampir 60 persen) dan hanya sebagian kecil dana yang dialokasikan untuk pembangunan secara riil.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penunjang sisi penerimaan pada APBD.

Tabel 3.5

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah
Menurut Jenis Pendapatan tahun Anggaran 1996/1997 – tahun 2000
(dalam ribu rupiah)

Jenis Pendapatan	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
I. Pajak daerah	269.177.195,31	294.955.964,56	187.763.359,25	269.804.270,79	392.164.841,53
a. PKB ¹⁾	103.251.735,55	117.001.030,31	118.176.639,22	146.298.681,50	151.705.731,12
b. BBN KB ²⁾	160.299.952,06	172.251.781,22	61.853.686,62	116.956.891,49	232.977.635,86
c. Pajak BBM	0,00	0,00	0,00	6.548.697,80	7.481.474,55
d. Tunggalan pajak	2.208.169,70	2.094.683,91	2.308.591,13	0,00	0,00
e. Denda pajak	3.417.338,00	3.608.469,12	5.424.442,28	0,00	0,00
II. Retribusi Daerah	43.548.004,17	50.594.787,22	18.863.012,15	34.130.739,95	40.244.663,68
III. Bagian Laba milik daerah	3.892.920,25	4.882.470,64	6.418.302,25	1.921.478,50	2.487.000,00
IV. Penerimaan dinas-dinas	1.645.123,74	2.190.602,53	1.478.659,91	0,00	0,00
V. Penerimaan lain-lain	12.896.504,44	12.148.374,05	30.018.310,35	12.698.755,03	70.763.506,39
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	331.159.747,91	364.772.199,00	244.541.643,91	318.555.244,27	505.660.011,60

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah dalam Indikator Ekonomi Jawa Tengah, 2000

PAD propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 mengalami kenaikan yang cukup tajam bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya apalagi bila diketahui bahwa dampak krisis ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pada tahun anggaran 1998/1999, ketika krisis tengah mendera bangsa ini, total PDB Propinsi Jawa Tengah adalah Rp. 244,5 Milyar lalu pada tahun 2000 PDB Propinsi Jawa Tengah naik lebih dari 100 persen dalam rentang waktu dua tahun yakni sebesar Rp 505,6 Milyar.

Beberapa hal yang mendukung naiknya jumlah PAD 2000 adalah meningkatnya porsi Pajak Daerah dan penerimaan lain yang juga sebesar 100 persen pada tahun itu bila dibandingkan dua tahun sebelumnya. Belum lagi adanya tambahan jenis pajak daerah baru semenjak tahun anggaran 1999/2000 yaitu pajak BBM.

Lebih dari itu adalah semakin meningkatnya proporsi PAD terhadap penerimaan daerah. Pada tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998, porsi PAD terhadap realisasi penerimaan dalam APBD berkisar 30 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi 40 persen pada dua tahun anggaran berikutnya meski pada saat itu krisis sedang melanda bangsa ini. Dan pada tahun anggaran 2000 proporsi tersebut meningkat menjadi 50 persen. Hal ini merupakan prestasi yang cukup menggembirakan, mengingat secara umum propinsi-propinsi di Indonesia rata-rata hanya memiliki proporsi PAD dibandingkan APBD kurang dari 30 persen.

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah menurut sektor

Pertumbuhan riil sektoral hingga tahun 2000 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Listrik, gas dan air bersih sebesar 9,66 persen dengan nilai sekitar Rp 493 Milyar. Dan sektor yang ternyata mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar 1,27 persen dengan nilai sekitar Rp 4,03 trilyun.

Pertumbuhan riil tahun 1997 antar sektor ekonomi berdasarkan data diatas terlihat bervariasi. Pertumbuhan ekonomi sektor-sektor kecuali sektor Listrik, Gas dan air bersih mengalami penurunan sebagai akibat krisis moneter. Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu 13,47 persen sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan dibawah 10 persen.

Sedangkan pada tahun 1998 semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor Listrik, Gas dan air bersih yang tumbuh sebesar 3,64 persen, meski begitu peranannya dalam PDRB hanya sebesar 1,07 persen. Sedangkan sektor keuangan ternyata mengalami pertumbuhan riil terendah yaitu -34,20 persen namun begitu peranannya terhadap PDRB adalah yang terbesar yaitu 3,95 persen.

Tabel 3.6
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993 di Jawa Tengah
 Tahun 1996-2000 (Juta Rupiah)

Lapangan usaha	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	8.487.971,93	8.216.026,20	7.742.852,27	8.184.670,67	8.447.654,90
Pertambangan dan Penggalian	527.557,05	5.874.256,67	545.662,76	575.612,99	589.963,73
Industri Pengolahan	13.327.648,25	13.709.740,32	11.707.062,06	12.036.861,68	12.421.426,4
Listrik, gas dan Air bersih	346.833,47	393.556,61	407.879,93	450.221,11	493.724,43
Bangunan	2.011.485,33	2.139.684,09	1.452.845,56	1.626.238,40	1.650.463,27
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.034.329,60	9.612.930,14	8.732.103,53	9.026.900,22	9.631.793,24
Pengangkutan dan Komunikasi	1.705.241,76	1.766.846,11	1.706.110,39	1.946.926,99	2.053.018,42
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.114.567,23	2.283.522,22	1.502.666,55	1.559.305,07	1.605.968,13
Jasa-jasa	4.306.569,10	4.420.088,54	3.995.962,44	3.987.776,61	4.038.526,07
PDRB	41.862.203,72	43.129.820,90	37.793.149,49	39.394.513,74	40.932.538,3

Sumber : BPS Jawa Tengah , 2001

Tabel 3.7

Laju Pertumbuhan dan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1996		1997		1998		1999		2000	
	LP	DP	LP	DP	LP	DP	LP	DP	LP	DP
Pertanian	3.37	20.28	-3.20	19.05	-5.76	20.86	3.07	20.78	3.21	20.64
Pertambangan Dan Penggalian	11.85	1.26	11.35	1.36	-7.11	1.43	5.49	1.46	2.49	1.44
Industri Pengolahan	8.71	31.84	2.87	31.79	-14.61	30.76	2.82	30.55	3.19	30.35
Listrik, Gas dan Air bersih	14.03	0.83	13.47	0.91	3.64	1.07	10.38	1.14	9.66	1.21
Bangunan	11.24	4.81	6.37	4.96	-32.10	3.82	11.93	4.13	1.49	4.03
Perdagangan, Hotel Dan restoran										
Pengangkutan dan Komunikasi	12.88	4.07	3.51	4.10	-3.44	4.64	10.29	4.94	5.45	5.02
Keuangan	7.11	5.05	7.99	5.29	-34.20	3.95	3.77	3.96	2.99	3.92
Jasa-jasa	4.13	10.29	2.64	10.25	-9.60	10.50	-0.20	10.12	1.27	9.87
PDRB	7.30	100	3.03	100	-12.37	100	3.49	100	3.90	100

Keterangan : LP : Laju Pertumbuhan

DP : Distribusi Persentase

Sumber : BPS Jawa Tengah ,2001

Selanjutnya, masih di tahun yang sama, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan negatif 9,16% dengan kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 22,98 %. Sementara itu untuk sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 30,76 % namun mempunyai pertumbuhan ekonomi yang jauh dari harapan yaitu sebesar – 14,61 %.

Peranan sektor pertanian yang sejak tahun 1992 sudah mulai tergeser, pada tahun 1995 dan 1996 mengalami pertumbuhan yang tergolong rendah

disbanding sektor lainnya (5,51 % dan 3,37 %). Bahkan pada tahun 1994,1997,1998 sektor ini justru mengalami pertumbuhan negatif (-0,37%, -3,20%, -5,76%). Namun sumbangan sektor tersebut terhadap PDRB masih cukup besar yaitu 20,86 % pada tahun 1998.

Adapun sektor-sektor yang lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 11,35% pada tahun 1997 namun menurun tajam pada tahun 1998 dengan tingkat pertumbuhan -32,10% pada tahun 1998. Hal ini berarti sektor ini mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 1997 yang mengalami pertumbuhan cukup baik yaitu 6,37% dan memberikan kontribusi sebesar 4,96% pada PDRB.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi suatu daerah pastilah berbeda jika dibandingkan dengan kondisi daerah lain. Oleh karena itu terjadilah pula perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana pembangunan daerah yaitu pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan ciri khusus yang pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian daerah itu sendiri.

Disinilah pentingnya posisi pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui secara pasti situasi dan kondisi daerahnya dalam melaksanakan pembangunan supaya terjadi keselarasan dalam pembangunan. Tidak ada tumpang tindih dan saling merugikan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Pada bagian ini, akan dilakukan perhitungan dalam penentuan potensi ekonomi daerah khususnya daerah propinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Locational Quotient dan Analisis Shift Share. Adapun data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan data tenaga kerja di Jawa Tengah dan di Indonesia. Kesemua data diatas dikumpulkan dari tahun 1993 hingga tahun 2000. Penggunaan dua jenis data PDB dan PDRB dengan data tenaga kerja dalam perhitungan potensi ekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensi suatu sektor di Jawa Tengah tidak hanya dari sisi Produk Domestiknya semata tetapi juga dilihat dari potensi ketenagakerjaannya.

Dalam kaitan inilah terungkap secara nyata betapa penting dan perlunya suatu penelitian mengenai potensi-potensi ekonomi unggulan yang dimiliki suatu daerah. Dari penelitian ini hasilnya akan dibutuhkan dan berguna dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

A. Analisis Locational Quotient

Telah menjadi suatu tujuan bagi setiap daerah untuk terus meningkatkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Salah satu usaha yang dilakuakn adalah dengan mempunyai kegiatan produksi yang hasilnya telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sisanya di ekspor ke daerah lain. Mengenai kegiatan produksi tersebut tentunya setiap daerah berbeda-beda satu sama lain. Hal ini disebabkan setiap daerah mempunyai keadaan dan karakteristik yang berlainan.

Untuk menjelaskan perbedaan di atas dapat digunakan Teori Basis Ekonomi. Dengan teori tersebut, dilakukan pembahasan mengenai sektor-sektor yang memiliki kelebihan produksi sehingga mampu mengekspor ke daerah lain dalam kerangka perekonomian daerah.

Sektor yang mengekspor ke daerah lain disebut sektor basis. Sedangkan sektor yang tidak mampu mengekspor ke luar daerah di sebut sektor non basis.

Alat pengukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan sektor non basis adalah metode Locational Quotient (LQ). Metode tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : (Iwan Jaya Azis, 1994 : 153) :

$$LQ_i^r = \frac{NTB_i^r / PDRB^r}{NTB_i^* / PDRB^*}$$

di mana :

LQ_i^r : LQ sektor i di propinsi Jawa Tengah

NTB_i^r : Nilai tambah bruto sektor i di propinsi Jawa Tengah

$PDRB^r$: PDRB propinsi Jawa Tengah

NTB_i^* : Nilai tambah bruto sektor i di Indonesia

$PDRB^*$: PDB Indonesia

Keterangan :

$LQ < 1$ berarti sektor yang bersangkutan produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri, disebabkan oleh kurangnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah karena tidak mempunyai keunggulan komparatif dan dikategorikan sektor non basis.

$LQ > 1$ atau $LQ = 1$ Berarti sektor yang bersangkutan produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut bahkan mengekspor. Oleh karena itu daerah tersebut dikatakan mempunyai keunggulan komparatif di sektor tersebut dan dikatakan sebagai sektor basis.

Pada penelitian ini, analisis LQ digunakan untuk mengetahui dari sembilan sektor yang ada manakah sektor basis dan non basis di propinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang digunakan adalah data per sektor lapangan usaha dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan data tenaga kerja propinsi Jawa

Tengah. Berikut ini perhitungan LQ dengan menggunakan Produk Domestik regional Bruto Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan perhitungan LQ selama periode waktu 1993-2000 (Tabel 4.1) di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data PDB dan PDRB atas dasar harga konstan 1993, dapat diketahui sektor sektor yang termasuk sektor basis dan non basis. Hal ini berarti penentuan suatu sektor itu basis atau non basis didasarkan atas nilai bruto sektoral atas aktivitas produksinya. Berikut ini hasil perhitungan LQ dari tahun 1993-2000 :

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Locational Quotient Propinsi Jawa Tengah
Menurut Lapangan Usaha / sektor Tahun 1993 – 2000
Menggunakan data PDB dan PDRB

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata ²
Pertanian	1,245	1,287	1,305	1,314	1,280	1,234	1,206	1,235	1,261
Pertambangan dan Penggalian	0,117	0,127	0,130	0,138	0,153	0,143	0,151	0,153	0,137
Industri Pengolahan	1,348	1,345	1,316	1,288	1,279	1,214	1,172	1,148	1,273
Listrik, Gas dan Air bersih	0,747	0,701	0,697	0,702	0,721	0,714	0,709	0,721	0,718
Bangunan	0,786	0,640	0,609	0,603	0,608	0,639	0,703	0,671	0,672
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,214	1,214	1,276	1,285	1,313	1,438	1,444	1,470	1,319
Pengangkutan dan Komunikasi	0,548	0,536	0,543	0,567	0,558	0,647	0,701	0,681	0,592
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,662	0,593	0,565	0,574	0,595	0,525	0,574	0,569	0,591
Jasa-jasa	1,026	1,153	1,149	1,162	1,170	1,083	1,033	0,591	1,093

Sumber : Data PDB dan PDRB diolah, lihat lampiran

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 1993-2000 ada kecenderungan tidak ada fluktuasi dalam sektor-sektor tersebut. Sektor-sektor tersebut tetap menjadi sektor basis ataupun masih menjadi sektor non basis. Sebagai contoh, sektor pertanian pada tahun 1993 nilai LQ

adalah 1,245 dan cenderung konstan sebagai sektor basis sampai pada tahun 2000 walaupun mengalami sedikit penurunan. Demikian juga dengan sektor yang lain, walaupun ada perubahan dalam nilai LQ-nya, peranannya tetap sebagai sektor basis maupun non basis.

Sementara itu, dalam periode waktu 1993-2000 tersebut jika dilihat secara rata-rata maka dapat diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan sektor basis, yaitu :

1. Sektor Pertanian (1,261)
2. Sektor Industri Pengolahan (1,273)
3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,319)
4. Sektor Jasa-jasa (1,093)

Empat sektor inilah yang merupakan sektor yang dikatakan memiliki keunggulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah bahkan mampu mengekspornya ke luar propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan sektor-sektor yang termasuk sektor non basis adalah :

1. Pertambangan dan Galian (0,137)
2. Listrik, Gas dan Air bersih (0,718)
3. Bangunan (0,672)
4. Pengangkutan dan Komunikasi (0,592)
5. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,591)

Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat diketahui bahwa secara rata-rata nilai LQ yang terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,319) sedangkan sektor Industri Pengolahan (1,273) pada urutan kedua dan sektor

pertanian (1,261) pada urutan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1993-2000 sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang sangat menunjang pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, walaupun kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian tidak dapat dikesampingkan.

Setelah mengetahui sektor-sektor basis dan non basis dari sisi produk domestiknya, selanjutnya dapat dihitung LQ dari data ketenagakerjaan.

Tabel 4.2

Hasil perhitungan Locational Quotient (LQ)

Propinsi Jawa Tengah Menggunakan data Tenaga kerja

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata ²
Pertanian	0,947	0,947	1,051	0,986	1,049	0,965	0,159	0,965	0,880
Pertambangan dan Penggalian	1,533	0,870	1,236	0,907	0,767	1,097	0,164	1,192	0,971
Industri Pengolahan	1,161	1,161	1,064	1,120	1,124	1,301	0,180	1,121	1,040
Listrik, Gas dan Air Bersih	2,049	1,124	1,108	1,757	1,289	0,967	0,122	1,443	1,232
Bangunan	1,125	1,176	1,018	1,263	1,186	1,271	0,210	1,025	1,034
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,089	1,069	0,996	0,994	0,908	0,954	0,147	1,016	0,890
Pengangkutan dan Komunikasi	0,837	0,794	0,699	0,826	0,836	0,860	0,136	0,877	0,733
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,646	0,647	0,569	0,605	0,744	0,789	0,123	0,904	0,628
Jasa-jasa	0,968	1,018	0,889	1,001	0,889	0,904	0,147	1,030	0,856

Sumber : Data tenaga kerja propinsi dan nasional 1993-2000 diolah. Lihat lampiran

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dengan berdasar data penyerapan tenaga kerja yang ada dapat diketahui nilai LQ-nya. Berdasar

nilai LQ tersebut secara rata-rata mulai tahun 1993-2000, hanya ada tiga sektor yang tergolong sektor basis. Keempat sektor tersebut adalah :

1. Sektor Industri pengolahan (1,040)
2. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih (1,232)
3. Sektor Bangunan (1,034)

Ketiga sektor inilah yang memiliki keunggulan bila ditinjau berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya di Jawa Tengah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja secara nasional. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ terbesar diantara ketiga sektor basis tersebut dengan nilai 1,232.

Sedangkan keenam sektor lainnya merupakan sektor non basis, yaitu:

1. Sektor Pertanian (0,880)
2. Sektor Pertambangan dan Galian (0,971)
3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,890)
- 4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (0,733)**
5. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,628)
6. Sektor Jasa-jasa (0,856)

Keenam sektor ini secara rata-rata masih merupakan sektor non basis bila ditinjau berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya. Sektor yang mempunyai LQ terendah sendiri adalah sektor keuangan. Hal ini berarti sektor keuangan di Jawa Tengah masih belum bisa menyerap tenaga kerja secara penuh.

B. Analisis Shift Share (SSA)

Alat analisis lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Shift Share (SSA). Dengan alat analisis ini maka pergeseran struktur perekonomian suatu daerah dapat diuji. Metode ini menganalisis pergeseran struktur perekonomian daerah perencanaan dalam hubungannya dengan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya serta mampu mengetahui sektor-sektor apa saja yang termasuk dalam sektor unggulan.

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah kriteria pertumbuhan yaitu melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan (terutama melihat perbedaan pertumbuhan) baik dalam skala yang lebih luas maupun dalam skala yang lebih kecil. Kriteria ini diperoleh dengan membandingkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah relatif terhadap kinerja sistem perekonomian yang lebih tinggi, maka akan diperoleh hubungan pengaruh wilayah perencanaan kabupaten dengan wilayah propinsi atau wilayah propinsi dengan suatu wilayah negara (nasional).

Dengan demikian pergeseran hasil pembangunan pada suatu wilayah propinsi maupun pada wilayah itu sendiri dapat diketahui. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, pendapatan, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja.

Sedangkan secara matematis hubungan dari ketiga komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$V^* = (V1/V) + (V_{i1}/V_i - V1/V) + (Y_{i1}/Y_i - V_{i1}/V_i)$$

di mana :

- V^* : Perubahan pendapatan wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah
- V_1 : Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- V : Pendapatan total wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar
- V_{i1} : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun akhir
- V_i : Pendapatan sektor i wilayah pengamatan pusat pada tahun dasar
- Y_{i1} : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun akhir
- Y_i : Pendapatan sektor i wilayah perencanaan propinsi Jawa Tengah pada tahun dasar

Ruas pertama dari rumus diatas menyatakan komponen pertumbuhan wilayah pengamatan (pusat), ruas kedua menyatakan komponen pertumbuhan proporsional dan ruas ketiga menyatakan komponen pertumbuhan daya saing propinsi Jawa Tengah.

Apabila komponen pertumbuhan proporsional suatu sektor > 0 maka sektor yang bersangkutan cepat pertumbuhannya dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian wilayah dan sebaliknya apabila < 0 . Suatu wilayah yang sebagian besar pendapatannya bersumber dari sektor yang lamban

pertumbuhannya, maka sektor yang bersangkutan akan tumbuh dibawah angka pertumbuhan.

Pada tingkat wilayah pengamatan khusus untuk komponen pertumbuhan daya saing wilayah, jika nilainya untuk suatu sektor > 0 , maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang luas dan sebaliknya < 0 .

Sebagaimana metode LQ, perhitungan Analisis Shift Share propinsi Jawa Tengah dan Indonesia (tingkat nasional / yang lebih luas) akan dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan dua data yang berbeda.

Kedua data tersebut adalah data Produk Domestik (PDB dan PDRB) berdasarkan harga konstan 1993 dan data tenaga ketenagakerjaan (propinsi dan Nasional) dari tahun 1993-2000. Berikut ini perhitungan SSA menggunakan data produk domestik bruto.

Tabel 4.3
Perhitungan Analisis Shift Share Propinsi Jawa Tengah
Menurut lapangan usaha / sektor tahun 1993-2000
Menggunakan data PDB dan PDRB

Sektor	Pertumbuhan Nasional $V1 / V$	Pertumbuhan Proporsional $(Vi1/Vi)-V1/V$	Pertumbuhan Daya Saing $(Yi1/Y1)-Vi1/V1$	Perubahan Pendapatan V^*
Pertanian	1,316	-0,125	-0,110	1,081
Pertambangan dan Penggalian	1,316	-0,099	0,230	1,447
Industri Pengolahan	1,316	-0,241	-0,344	1,213
Listrik, Gas dan Air bersih	1,316	1,133	-0,288	2,161
Bangunan	1,316	-0,005	-0,282	1,028
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,316	-0,038	0,138	1,415

Pengangkutan dan Komunikasi	1,316	0,096	0,192	1,605
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,316	-0,119	-0,254	0,942
Jasa-jasa	1,316	-0,193	-0,089	1,033

Sumber : data PDB dan PDRB diolah, lihat lampiran

Dari Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa terjadi perubahan pendapatan yang positif untuk semua sektor usaha di Propinsi Jawa Tengah, walaupun besarnya bervariasi dari tiap sektor. Perubahan yang terbesar terjadi pada sektor Listrik, gas dan Air bersih (2,161), berikutnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (1,605). Urutan selanjutnya adalah sektor pertambangan dan galian (1,447), kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,415), sektor industri pengolahan (1,213), sektor pertanian (1,081), sektor jasa-jasa (1,033), kemudian sektor bangunan (1,028) dan sektor keuangan merupakan sektor dengan perubahan terkecil yaitu sebesar 0,942.

Sektor-sektor usaha yang komponen pertumbuhan proporsionalnya mempunyai nilai positif adalah :

1. Sektor Industri Pengolahan (0,241)
2. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih (1,133)
3. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (0,096)

Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor usaha tersebut pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor usaha sejenis di Indonesia dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian wilayahnya. Sedangkan sektor-sektor yang usaha yang lainnya yaitu : sektor pertanian, pertambangan dan galian, bangunan, perdagangan, hotel

dan restoran, keuangan dan jasa-jasa mempunyai pertumbuhan yang lebih lambat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai negatif pada komponen pertumbuhan proporsional. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor usaha tersebut pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor usaha sejenis di Indonesia.

Sementara itu, sektor-sektor usaha yang mempunyai daya saing yang lebih tinggi di Propinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan daya saing sektor sejenis di Indonesia ditunjukkan oleh nilai komponen daya saing yang positif.

Sektor- sektor usaha tersebut adalah :

1. Sektor Pertambangan dan galian (0,230)
2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,138)
3. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (0,192)

Sebaliknya sektor-sektor yang daya saingnya lebih kecil karena mempunyai nilai komponen daya saing negatif meliputi sektor pertanian (-0,110); sektor industri pengolahan (-0,344); sektor listrik, gas dan air bersih (-0,288); sektor bangunan (-0,282); sektor keuangan (-0,254); dan sektor jasa-jasa (-0,089).

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa struktur perekonomian propinsi Jawa Tengah telah bergeser dari pertanian ke arah industri dan jasa-jasa. Sektor-sektor usaha industri dan jasa tersebut tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi di bandingkan sektor pertanian.

Sementara itu, bila perhitungan Shift Share Analysis dengan menggunakan data penyerapan tenaga kerja di dapat hasil sebagaimana pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Perhitungan Analisis Shift Share Propinsi Jawa Tengah
Menurut Lapangan Usaha / sektor tahun 1993-2000
Menggunakan data tenaga kerja

Sektor	Pertumbuhan Nasional $V1 / V$	Pertumbuhan Proporsional $(Vi1/Vi)-V1/V$	Pertumbuhan Daya Saing $(Yi1/Y1)-Vi1/V1$	Perubahan Pendapata n V^*
Pertanian	1,145	-0,180	-0,105	0,859
Pertambangan dan Penggalian	1,145	-0,355	-0,235	0,554
Industri Pengolahan	1,145	0,264	-0,081	1,328
Listrik, Gas dan Air bersih	1,145	-0,482	-0,241	0,421
Bangunan	1,145	-0,245	-0,247	1,143
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,145	0,428	-0,250	1,323
Pengangkutan dan Komunikasi	1,145	0,623	-0,096	1,672
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,145	0,390	0,401	1,937
Jasa-jasa	1,145	-0,179	-0,038	0,927

Sumber : data PDB dan PDRB diolah, lihat lampiran

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja yang positif untuk semua sektor usaha di Propinsi Jawa Tengah, walaupun besarnya bervariasi dari tiap sektor. Perubahan yang terbesar terjadi pada sektor keuangan (1,937), berikutnya sektor pengangkutan dan komunikasi (1,672). Urutan selanjutnya adalah sektor Industri pengolahan (1,328); sektor

perdagangan, hotel dan restoran meduduki urutan selanjutnya setelah industri pengolahan yang memiliki tingkat perubahan pendapatan yaitu sebesar (1,323); kemudian sektor bangunan (1,143); selanjutnya adalah sektor jasa-jasa (0,927); sektor pertanian pada urutan berikutnya (0,859); disusul sektor pertambangan dan galian (0,554), dan yang merupakan sektor dengan perubahan terkecil adalah sektor Listrik,gas dan air bersih yaitu sebesar 0,421.

Sektor-sektor usaha yang komponen pertumbuhan proporsionalnya mempunyai nilai positif adalah :

1. Sektor industri pengolahan (0,264)
2. Sektor bangunan (0,245)
3. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,428)
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi (0,623)
5. Sektor Keuangan (0,390)

Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor usaha tersebut pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor usaha sejenis di Indonesia dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian wilayahnya. Sedangkan sektor-sektor usaha yang lainnya, yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik,gas dan air bersih dan kemudian sektor jasa-jasa mempunyai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih lambat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai negatif pada komponen pertumbuhan proporsional. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor usaha tersebut pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor usaha sejenis di Indonesia.

Sementara itu, sektor usaha yang mempunyai daya saing yang lebih tinggi di propinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan daya saing sektor sejenis di Indonesia ditunjukkan oleh nilai komponen daya saing yang positif. Sektor yang mempunyai daya saing yang positif hanya satu sektor, yaitu sektor keuangan. Sedangkan delapan sektor yang lain mempunyai daya saing yang rendah, hal ini ditunjukkan dengan nilai komponen pertumbuhan daya saing yang negatif.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa struktur perekonomian propinsi Jawa Tengah berdasarkan penyerapan tenaga kerja pada tiap-tiap sektor telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Sektor-sektor usaha industri dan jasa tersebut menyerap tenaga kerja tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian.

C. ANALISIS GABUNGAN LQ – SSA

Analisis gabungan ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor yang benar-benar merupakan sektor unggulan di propinsi Jawa Tengah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sektor-sektor tersebut dinilai dari sisi basis atau non basisnya, keunggulan komparatifnya, dan laju pertumbuhannya. Cara penilaiannya adalah dengan memberikan tolok ukur dengan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

Prioritas pertama : apabila sektor tersebut merupakan sector basis, mempunyai keunggulan komperatif dan laju pertumbuhannya cepat.

Prioritas kedua apabila sektor tersebut merupakan:

- d. Sektor basis dan mempunyai keunggulan komperatif.

- e. Sektor basis dan pertumbuhannya cepat.
- f. Sektor non basis yang mempunyai keunggulan komperatif **dan** pertumbuhannya cepat.

Prioritas ketiga : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis namun hanya mempunyai keunggulan komperatif saja.

Prioritas keempat : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis namun pertumbuhannya cepat.

Prioritas kelima : apabila sektor tersebut merupakan sektor non basis tidak mempunyai keunggulan komperatif dan pertumbuhannya lambat.

Prioritas alternatif : sektor tersebut merupakan sektor basis namun pertumbuhannya lambat dan tidak mempunyai keunggulan komparatif.

Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan dua macam data untuk perhitungan maka, pada perhitungan gabungan ini juga akan ditinjau dari kedua jenis data tersebut yaitu data produk domestik dan data tenaga kerja.

Berdasarkan analisis struktur ekonomi melalui analisis LQ dan Shift Share diatas kemudian digabungkan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel. 4. 5
Hasil Gabungan Analisis LQ dan SSA
Menggunakan data PDB dan PDRB

Sektor	LQ	S				Rangking
		Tumbuh Cepat	Unggul Komparatif	Tumbuh Lambat	A Tidak Unggul Komparatif	
Pertanian	B			-	-	Alternatif
Pertambangan dan Penggalian	NB		+	-		III
Industri Pengolahan	B	+			-	II
Listrik, Gas dan Air bersih	NB	+			-	IV
Bangunan	NB			-	-	V
Perdagangan, Hotel dan Restoran	B			-		Alternatif
Pengangkutan dan Komunikasi	NB	+	+			II
Keuangan, perse waan dan jasa perusahaan	NB		+	-	-	III
Jasa-jasa	B			-	-	Alternatif

Sumber : data PDB dan PDRB diolah, lihat lampiran

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat bahwa setelah dilakukan berbagai pendekatan analisis terhadap perekonomian propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode LQ dan SSA, maka hasil dari gabungan kedua analisis tersebut memberikan usulan alternatif program pengembangan regional propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor prioritas pertama tidak ada
2. Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi
 - a. Industri pengolahan
 - b. Pengangkutan dan Komunikasi
3. Pengembangan sektor prioritas ketiga meliputi :
 - a. Pertambangan dan galian
 - b. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
4. Pengembangan sektor prioritas keempat hanya ada satu sektor, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih.
5. Pengembangan sektor prioritas kelima hanya ada satu sektor, yaitu sektor bangunan.
6. Pengembangan sektor alternatif meliputi :
 - a. Pertanian
 - b. Perdagangan, hotel dan restoran
 - c. Jasa – jasa

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dianalisa maka Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun 1993 – 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan :

a. Sektor-sektor prioritas yang mendukung perekonomian Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1993 – 2000 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertanian
- 2) Industri Pengolahan
- 3) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 4) Jasa – jasa

Keempat sektor tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian Propinsi Jawa Tengah, yang kegiatannya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan dapat diekspor ke luar daerah.

b. Selama kurun waktu (1993 – 2000) diketahui bahwa sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan proporsional dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian yang lebih tinggi meliputi :

- 1) Industri pengolahan
- 2) Listrik, gas dan air bersih
- 3) Pengangkutan dan Komunikasi

Sedangkan untuk sektor-sektor yang memiliki keunggulan daya saing atau keunggulan komparatif di propinsi Jawa Tengah adalah :

- 1) Pertambangan dan penggalian
- 2) Perdagangan, Hotel dan restoran
- 3) Pengangkutan dan Komunikasi

c. Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) dapat disusun sektor-sektor yang memiliki prospek lebih bagus untuk dikembangkan di propinsi Jawa Tengah. Sektor-sektor tersebut kita bagi menjadi 6 klasifikasi dengan prioritas yang berbeda-beda.

- 1) Pengembangan sektor prioritas pertama tidak ada
- 2) Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi :
 - a. Industri pengolahan
 - b. Pengangkutan dan komunikasi
- 3) Pengembangan sektor prioritas ketiga meliputi :
 - a) Pertambangan dan penggalian
 - b) Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
- 4) Pengembangan sektor prioritas keempat hanya ada satu sektor, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih

- 5) Pengembangan sektor prioritas kelima hanya ada satu sektor, yaitu sektor bangunan
 - 6) Pengembangan sektor alternatif meliputi :
 - a) Pertanian
 - b) Perdagangan, Hotel dan restoran
 - c) Jasa – jasa
2. Sedangkan berdasarkan nilai penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor maka dapat disimpulkan lebih lanjut :
- a. Sektor-sektor prioritas yang mendukung perekonomian Jawa tengah selama kurun waktu 1993 – 2000 adalah sebagai berikut :
 - 1) Industri pengolahan
 - 2) Listrik, gas dan air bersih
 - 3) Bangunan
 - b. Selama kurun waktu (1993 – 2000) diketahui bahwa sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi meliputi :
 - 1) Industri Pengolahan
 - 2) Listrik, gas dan air bersih
 - 3) Pengangkutan dan komunikasi

Sedangkan untuk sektor-sektor yang memiliki keunggulan daya saing atau keunggulan komparative dalam hal penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah hanya ada satu sektor yaitu sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.

c. Dari hasil analisis gabungan antara location quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) dapat disusun sektor-sektor yang memiliki prospek lebih bagus untuk dikembangkan di propinsi Jawa Tengah berdasarkantingkat penyerapan tenaga kerjanya. Sektor-sektor tersebut kita bagi menjadi 6 klasifikasi dengan prioritas yang berbeda-beda.

- 1) Pengembangan sektor prioritas pertama tidak ada
- 2) Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi :
 - a. Industri pengolahan
 - b. Bangunan
 - c. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
- 3) Pengembangan sektor prioritas ketiga hanya ada satu sektor yaitu sektor listrik, gas dan air bersih.
- 4) Pengembangan sektor prioritas keempat meliputi :
 - a. Perdagangan, hotel dan restoran
 - b. Pengangkutan dan Komunikasi
- 5) Pengembangan sektor prioritas kelima meliputi :
 - a. Pertanian
 - b. Pertambangan dan penggalian
 - c. Jasa – jasa
- 6) Pengembangan sektor alternatif tidak ada

B. Saran – saran

Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Peningkatan sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian propinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain peningkatan teknologi agar sektor pertambangan dan penggalian dapat memperoleh hasil yang maksimal, selain itu peningkatan armada dan angkutan umum perlu dilakukan demi peningkatan sektor perhubungan dan komunikasi. Pemerintah juga perlu mempermudah ijin-ijin yang membantu meningkatkan sektor jasa di Propinsi Jawa Tengah.
2. Sektor pertanian dan sektor bangunan juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Sektor pertanian semakin lama kontribusinya semakin kecil padahal Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan sektor ini. Pengembangan agrobisnis yang menjanjikan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah dan dunia usaha. Untuk itu perlu diadakan penelitian dan pembenahan teknologi yang berkaitan dengan sektor pertanian.
3. Pengembangan sektor prioritas juga harus memperhatikan tingkat penyerapan dari sektor tersebut. Sektor, industri pengolahan, listrik, gas

dan air bersih serta bangunan perlu mendapat perhatian karena sektor ini mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja yang menjanjikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta. 1998. *Susenas 1998*. BPS : Jakarta
- Badan Pusat Statistik Jakarta. 2000. *Susenas 2000*. BPS : Jakarta
- Badan Pusat Statistik Jakarta. 2002. *Susenas 2002*. BPS : Jakarta
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 1995. *Jawa Tengah dalam Angka 1995*. BPS: Semarang
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 1998. *Jawa Tengah dalam Angka 1998*. BPS: Semarang
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 2000. *Jawa Tengah dalam Angka 2000*. BPS: Semarang
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 2001. *Jawa Tengah dalam Angka 2001*. BPS: Semarang
- Hendra Esmara. 1985. *Memelihara Momentum Pembangunan*. Gramedia: Jakarta
- Issard. 1971. *Method of Regional Analysis*. MIT Press : Cambridge
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 2000. *Indikator Ekonomi Jawa Tengah 2000*. BPS : Semarang
- Iwan Jaya Azis. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. LPFE UI: Jakarta
- Lincoln Arsyad. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi*. PT. Media Widya Mandala: Yogyakarta
- Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM: Yogyakarta

- Michael Todaro. 1991. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Payaman Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi SDM*. FE UI : Jakarta
- Suroso. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tri Hartanto. 2001. “ *Analisis Sektor-sektor Prioritas yang Mendukung Perekonomian Daerah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah*”. Skripsi. FE UNS: Surakarta
- Yasri. 1994. “ Dampak Sektor Industri Kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat “. *Kumpulan Makalah Ekonomi Regional*. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran : Bandung
- Yudo Swasono – Endang Sulistyaningsih.1983. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat nasional, Regional dan Perusahaan*. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta
- Yusuf Maulana. 1999.” *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*”. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XLVII. Nomor 2 th 1999: Jakarta

Tabel IV. 6
Hasil Gabungan Analisis LQ dan SSA
Menggunakan data tenaga kerja

Sektor	LQ		S	S	A	Rangking
			Unggul	Tumbuh	Tidak Unggul	
	Cepat	Komparatif	Komparatif	Lambat	Komparatif	
Pertanian	NB			-	-	V
Pertambangan dan Penggalian	NB			-	-	V
Industri Pengolahan	B	+			-	II
Listrik, Gas dan Air bersih	B			-	-	III
Bangunan	B	+			-	II
Perdagangan, Hotel dan	NB	+			-	IV

Restoran					
Pengangkutan dan Komunikasi	NB	+		-	IV
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	NB	+	+		II
Jasa-jasa	NB			-	V

Sumber : data tenaga kerja diolah, lihat lampiran

Dari tabel IV. 6 diatas terlihat bahwa setelah dilakukan berbagai pendekatan analisis terhadap perekonomian propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode LQ dan SSA dengan menggunakan data tenaga kerja, maka hasil dari gabungan kedua analisis tersebut dapat memberikan usulan alternatif program pengembangan regional propinsi Jawa Tengah sebagai berikut;

1. Pengembangan sektor prioritas pertama tidak ada
2. Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi
 - a. Industri pengolahan
 - b. Bangunan
 - c. Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan
3. Pengembangan sektor prioritas ketiga hanya ada satu sektor yaitu sektor listrik, gas dan air bersih
4. Pengembangan sektor prioritas keempat meliputi:
 - a. Perdagangan, hotel dan restoran
 - b. Pengangkutan dan Komunikasi

5. **Pengembangan sektor prioritas kelima meliputi :**
 - a. **Pertanian**
 - b. **Pertambangan dan Pengegalian**
 - c. **Jasa – jasa**
6. **Pengembangan sektor alternatif tidak ada**

